



PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

BADUNG INKLUSIF INVESTASI

MELALUI TRANSFORMASI
DIGITAL PELAYANAN
PENANAMAN MODAL



BADUNG *Melayani*





Daftar Isi



1

**Kondisi dan Permasalahan
Penanaman Modal**

2

Pembentukan BISC

3

MPP Kabupaten Badung

4

**Transformasi Digital MPP
Kabupaten Badung**



PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

KONDISI DAN PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL





Kondisi Penanaman Modal

1

Target Pemerintah Pusat EODB Indonesia Tahun 2021 meningkat menjadi peringkat 50 dari peringkat 73 pada Tahun 2019 (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Percepatan Kemudahan Berusaha)

2

BPS mencatat Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi pada kuartal III 2019 hanya tumbuh 4,21% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan kuartal III 2018 sebesar 6,96%.

3

Data BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi terus melambat dan hal ini sangat tampak pada data realisasi investasi Tahun 2019.

4

Sektor yang diminati investor juga tampak mulai bergeser dari sektor yang diprioritaskan pemerintah.

5

Incremental capital output ratio (ICOR) tercatat masih pada angka 6,3 pada 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing Indonesia pada level global seperti India dan Vietnam yang mencatatkan ICOR masing-masing sebesar 4,64 dan 4,31. Hal ini menunjukkan bahwa secara makro investasi di Indonesia masih tidak efisien.

6

Sektor yang diminati investor juga tampak mulai bergeser dari sektor yang diprioritaskan pemerintah.





Bali Paling diminati Investor di Sektor Pariwisata

BKPM menyebutkan, ada 8 lokasi di Indonesia yang diminati investor untuk menanamkan modal dalam sektor pariwisata baik asing maupun dalam negeri.

- 1 Bali, dengan nilai investasi Rp 19,2 triliun(29 persen)
- 2 Jakarta, dengan nilai investasi Rp 17,2 triliun(26 persen)
- 3 Jawa Barat, dengan nilai investasi Rp 6.697,6 miliar (10 persen)
- 4 Kepulauan Riau, dengan nilai investasi Rp 6,6 triliun (10 persen)
- 5 Jawa Timur, dengan nilai investasi Rp 2,5 triliun (4 persen)
- 6 Nusa Tenggara Barat, dengan nilai investasi Rp 2,3 triliun (3 persen)
- 7 Jawa Tengah, dengan nilai investasi Rp 2,03 triliun (3 persen)
- 8 Sulawesi Utara, dengan nilai investasi Rp 1,39 triliun (2 persen)

Sumber :

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/27/062419126/pemodal-asing-sektor-pariwisata-betah-investasi-di-bali>.





Realisasi PMA di Provinsi Bali Tahun 2019-2022

KABUPATEN/KOTA	Penanaman Modal Asing (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	-	6.180	1.722	55.661	107.299
Kab. Tabanan	1.143	196.395	94.481	1.066.835	670.349
Kab. Badung	251.581	4.382.400	2.783.261	2.315.029	3.238.136
Kab. Gianyar	6.566	585.735	234.196	618.811	944.099
Kab. Klungkung	15.380	87.780	273.871	123.249	164.481
Kab. Bangli	-	885	1.352	4.411	8.597
Kab. Karangasem	272.339	152.550	120.010	49.639	55.008
Kab. Buleleng	1.758.680	230.505	277.252	1.108.616	126.336
Kota Denpasar	32.906	747.915	436.687	1.256.461	1.136.541
Provinsi Bali	2.338.595	6.390.345	4.222.832	6.598.711	6.450.848

Sumber : BPS Provinsi Bali



Lima Keluhan Utama Para Investor

Regulasi

Terlalu banyak aturan yang abu-abu, tidak jelas, tumpang tindih kewenangan, dan seringkali berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu



Perizinan

Sengketa lahan, kerumitan dalam membebaskan lahan, izin-izin bangunan, pengurusan sertifikat layanan fungsi yang bisa memakan biaya berbulan-bulan dengan biaya yang tidak murah.



Dominasi BUMN

Banyak investor dari pihak swasta yang mengeluhkan banyaknya pihak BUMN yang mendapatkan sektor usaha dari pemerintah



Perpajakan

Keluhan perlakuan kantor pajak kepada investor



Ketenagakerjaan

Diperlukan penyesuaian UU Ketenagakerjaan supaya lebih fleksibel, modern, lebih mencerminkan realita ketenagakerjaan di abad 21





PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

PEMBENTUKAN BADUNG *INVESTMENT SERVICE CENTER*





Apa itu Badung Investment Service Center ?

Badung Investment Service Center (BISC) merupakan Tim *Adhoc* (Non Struktural) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan tugas utama memfasilitasi dan mendorong para penanam modal (investor) yang berminat investasi di Kabupaten Badung (*engine of growth*). BISC terdiri dari unsur Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, asosiasi profesi, dan tenaga ahli perguruan tinggi.





Mengapa Diperlukan BISC?

1. Peran Pemerintah Kabupaten Badung belum optimal dalam memfasilitasi masuknya para penanam modal (investor) baik PMA maupun PMDN.
2. Para Penanam Modal (investor) memerlukan akses informasi yang mudah dan perbaikan koordinasi antar lembaga, kepastian hukum, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan serta keamanan berusaha.
3. Diperlukan kebijakan yang pro-investasi serta langkah komprehensif mengatasi faktor-faktor penghambat iklim investasi guna terwujudnya kemudahan berusaha (*ease of doing business*) sehingga realisasi investasi di Kabupaten Badung dapat meningkat.
4. Diperlukan Tim Terpadu yang memiliki akselerasi tinggi dan profesional dalam pengelolaan investasi, mulai tahapan perencanaan penanaman modal, promosi potensi dan peluang investasi, kerjasama penanaman modal serta penyelesaian permasalahan penanaman modal di Kabupaten Badung.
5. Kabupaten Badung perlu menggali sumber pendapatan daerah melalui peningkatan investasi.





Rencana Strategis BISC



KONSEP

Badung Green Investment



FUNGSI

Investment Liaison



TUJUAN

Ease of Doing Business



TUJUAN

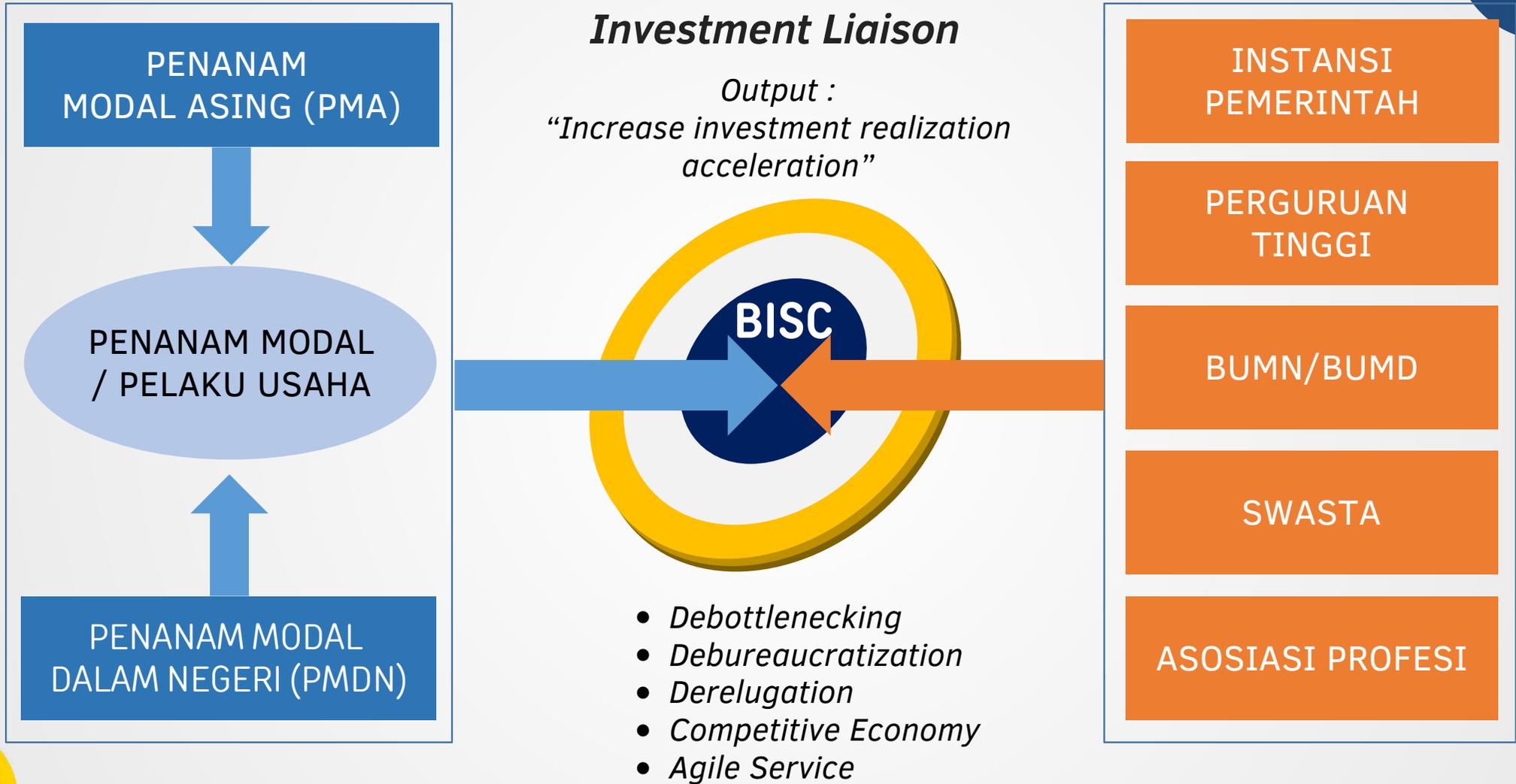
Increase investment realization

INVESTMENT SUPPORT

- *Investment Branding*
- *Recent Economic Development (RED)*
- *Website BISC*
- *Investment Information Management System*



Kedudukan BISC





Konsep Dasar Pengembangan BISC



Prinsip Layanan BISC

1. **Sinergitas**

2. **Profesional**

3. **Progresif**

4. **Integrasi**

PRIORITY SERVICE : END TO END (INVEST > 50 Milyard)

PENYEDERHANAAN REGULASI / OMNIBUS LAW

PENANAMAN MODAL

- PERDA PENANAMAN MODAL KABUPATEN BADUNG
- PERDA INSENTIF BAGI PENANAM MODAL
- PERBUP PEMBENTUKAN BISC
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEANGGOTAAN BISC

PERLU PERCEPATAN KEMUDAHAN BERUSAHA

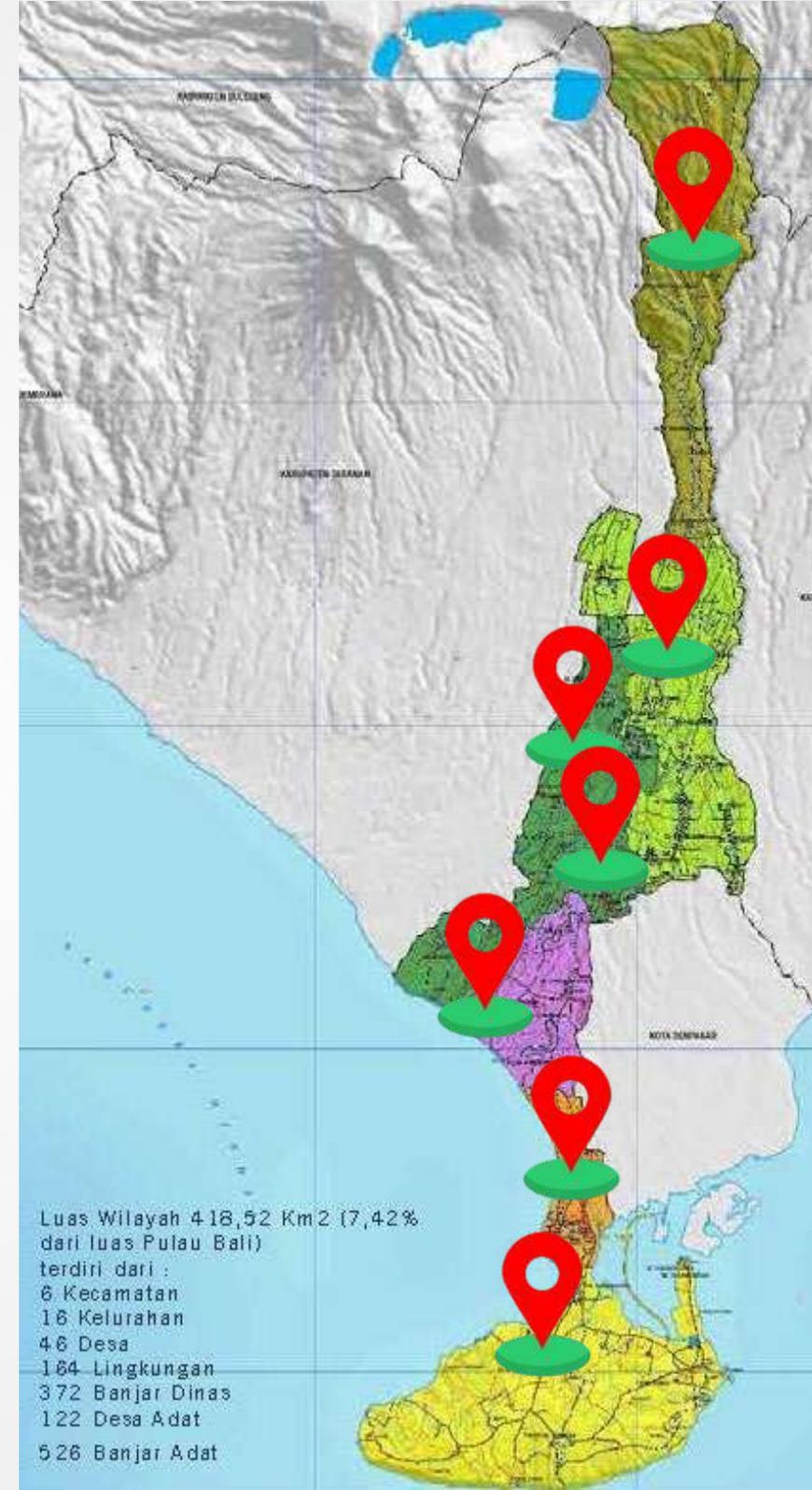
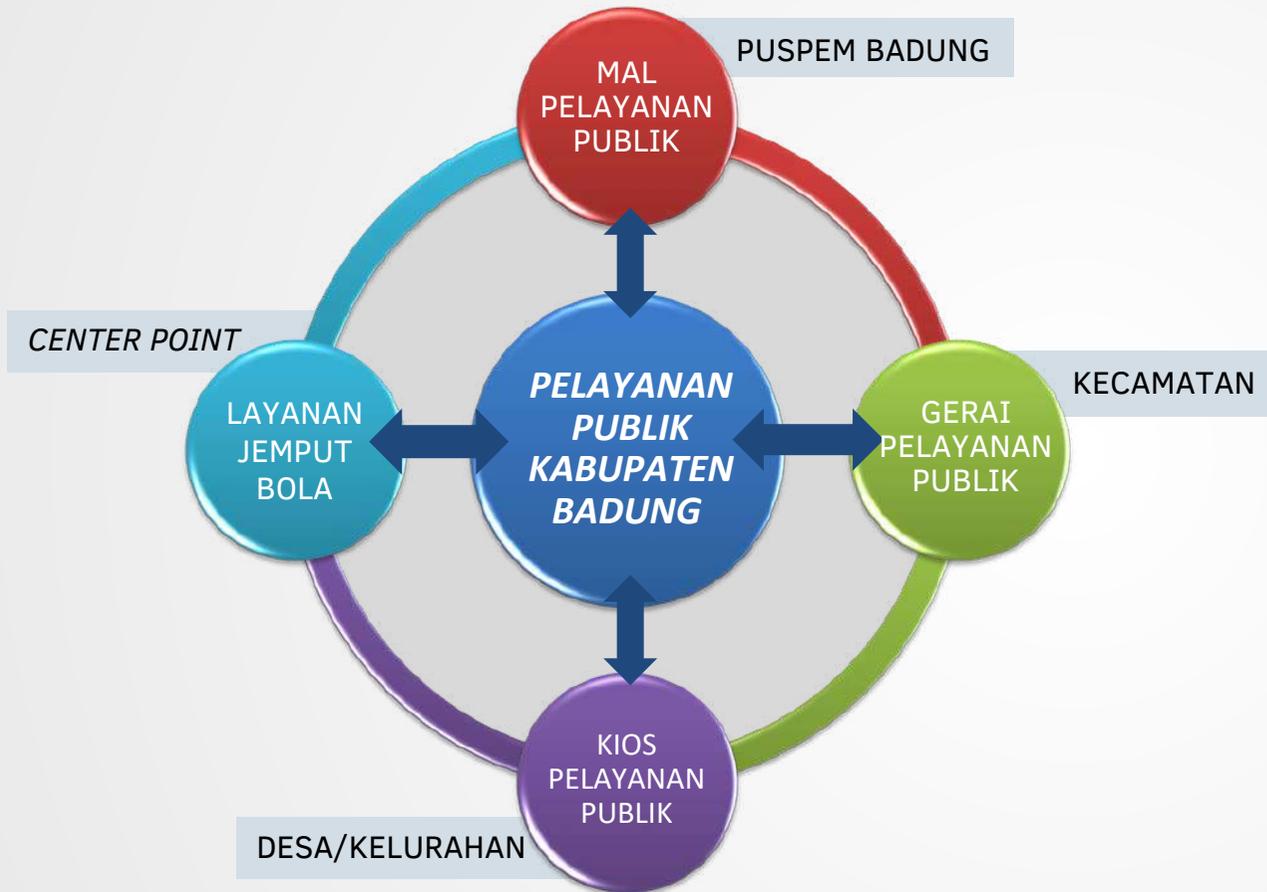
PERIZINAN & NON PERIZINAN

- PERDA PERCEPATAN KEMUDAHAN BERUSAHA
- PERBUP TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN KEMUDAHAN BERUSAHA
- INTEGRASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DENGAN LAPERON (LAYANAN PERIZINAN ONLINE)

PERLU PENYEDERHANAAN / OMNIBUS LAW



Service Point Pendukung BISC





Milestone Pembentukan BISC

1

Persiapan Pembentukan BISC

Rapat persiapan, Focus Group Discussion, Audensi dengan Bupati Badung dan Sounding dengan instansi terkait (stakeholders)

1

2

Penyusunan Grand Design BISC

Penyusunan Grand design BISC, Investment Promotion Tools, Konsultasi Publik, Konsultasi ke BKPM dan Benchmarking.

2

3

Penyusunan Regulasi dan Formasi BISC

Perbup Pembentukan BISC, Perbup Grand Design BISC, dan Keputusan Bupati tentang Formasi Keanggotaan BISC.

3

4

Penyiapan Sarana, Prasarana & SDM

Penyiapan Kantor BISC, Peralatan Kantor, Meubelair, Website BISC, Infratraktur dan Petugas.

4

5

MOU & Launching BISC

Tanda tangan MOU dengan Stakeholder BISC dan Launching BISC

Goal





Tugas & Fungsi BISC

1. Memfasilitasi para penanam modal (investor) yang berminat berinvestasi di Kabupaten Badung.
2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Badung;
3. Memberikan informasi peluang investasi di Kabupaten Badung secara proaktif dan profesional;
4. Melaksanakan misi promosi investasi;
5. Melaksanakan pemantauan minat investasi di wilayah Kabupaten Badung;
6. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam berinvestasi serta mendorong realisasi investasi;
7. Mengusulkan program kerja dan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian target investasi di Kabupaten Badung;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan investasi di Kabupaten Badung.





Jenis Layanan BISC

1. Laws and regulations (Hukum dan peraturan)
2. Investment opportunities (Peluang investasi)
3. Business-matching (Pencocokan bisnis)
4. Licensing procedures (Prosedur perizinan)
5. Investment Counseling (Konsultasi Investasi)
6. Investment Guarantee (Penjaminan Investasi)
7. Investment Consulting Services (Layanan Konsultan Investasi)
8. Banking Services (Layanan Perbankan)
9. Notary and Lawyer Services (Layanan Notaris dan Pengacara)
10. Language Translator Service (Layanan Penterjemah Bahasa)
11. Other matters related with investment (Hal-hal yang terkait dengan investasi)





Program Utama BISC

- *Public Private Partnership/ KPBU*
(Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)
- *Sister City* (Kota Kembar)
- *Market Sounding* (Pemasaran Investasi)
- *Business Gathering* (Temu Bisnis)
- *Business Forum* (Forum Bisnis)
- *Business Linkage* (Hubungan Bisnis)
- *Investment Promotion* (Promosi Investasi)
- *Investor Coaching* (Pembinaan Investor)
- *Badung Investment Award*
(Penghargaan Investasi Badung)





Output Utama BISC

1

Meningkatnya realisasi investasi.

2

Berkembangnya pembangunan daerah.

3

Pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

4

Terbukanya lapangan kerja baru.

5

Perluasan akses pasar dan permodalan.





PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BADUNG





Mal Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan adanya MPP ini, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat merasakan manfaat positif karena adanya kemudahan, keterpaduan, kenyamanan dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Badung.

Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk:

- Mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
- Meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.





Jumlah Layanan Pada MPP Kabupaten Badung

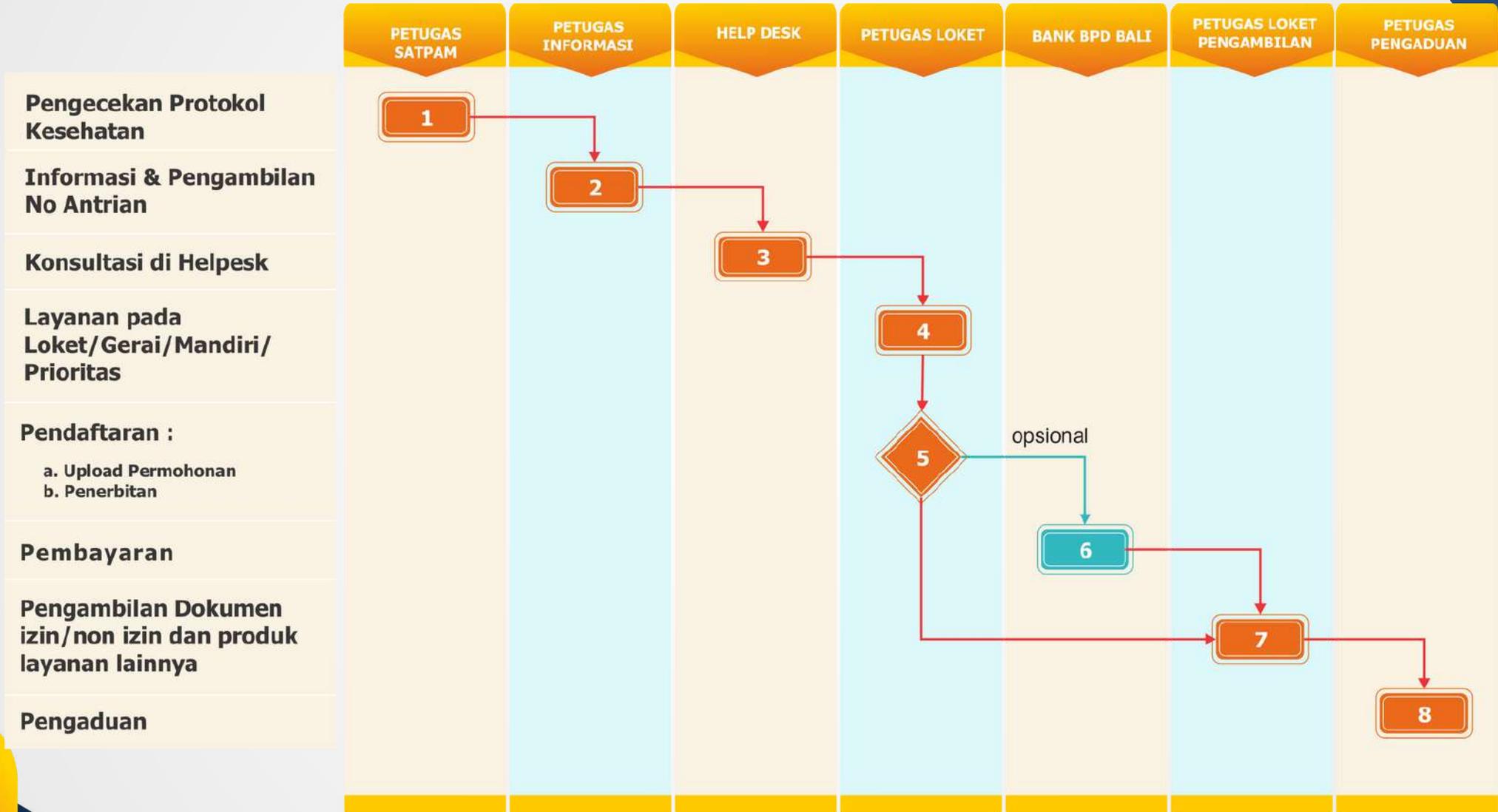


31 JENIS INSTANSI

280 JENIS LAYANAN



Alur Pelayanan Pada MPP Kabupaten Badung





Gerai Pelayanan Publik / Kios Pelayanan Publik

Gerai Pelayanan Publik (GPP) dan **Kios Pelayanan Publik (KPP)** merupakan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Badung untuk memberikan kemudahan berusaha dengan mendekatkan layanan kepada para pelaku usaha. GPP menjadi pendekatan layanan perizinan berusaha di tingkat kecamatan, sementara KPP menjadi pendekatan layanan di tingkat desa/kelurahan.

Dengan adanya GPP dan KPP, diharapkan bahwa layanan perizinan menjadi lebih dekat, aksesibel, dan responsif terhadap kebutuhan para pelaku usaha. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim berusaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung.





LIMOSSIN JEBOL UMKM

LIMOSSIN JEBOL UMKM merupakan singkatan dari "Layanan Perizinan Bermobil Online Single Submission Terintegrasi Jemput Bola Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Badung". Layanan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan serta mempercepat proses pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat khususnya kepada UMKM di Kabupaten Badung.





PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

TRANSFORMASI DIGITAL MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BADUNG

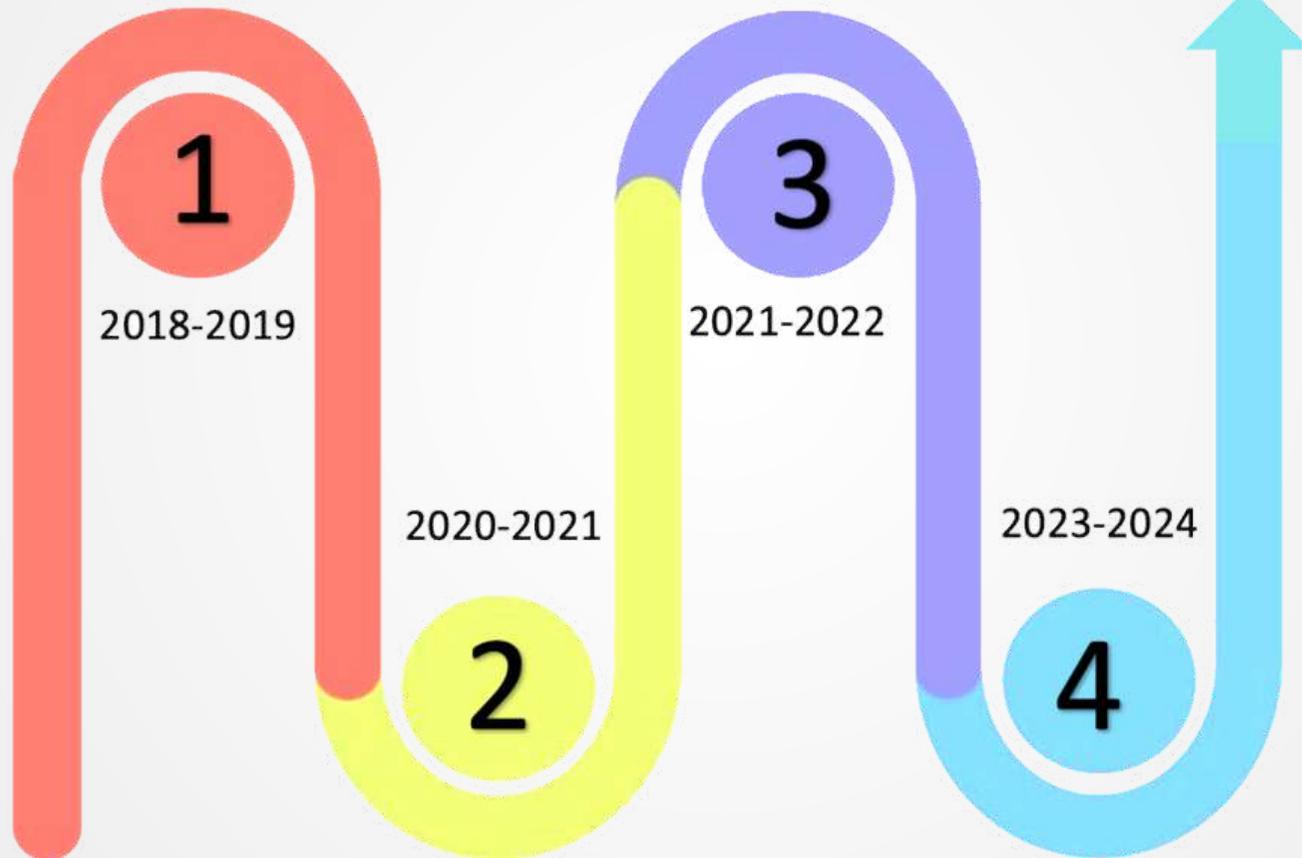




Road Map Transformasi Digital Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung



Pembangunan Sistem Laperon



Pengembangan Sistem Laperon



trust
Transparency. Responsibility. Upright.
Sustainable. Technology.

Integrasi Sistem Layanan MPP



Integrasi Sistem Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung

- Portal MPP Badung
- Sistem Antrian Online
- Sistem Pembayaran Online
- Omnichannel Contact Center
- Integrasi dengan *Command Center*
- SKM Online
- TRUST (SPI Online)
- Sistem Pengelolaan Pengaduan





INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TIK

MPP
Mal Pelayanan Publik



MPP CARE
Sistem Pengaduan Masyarakat



Laperon
Layanan Perizinan Online



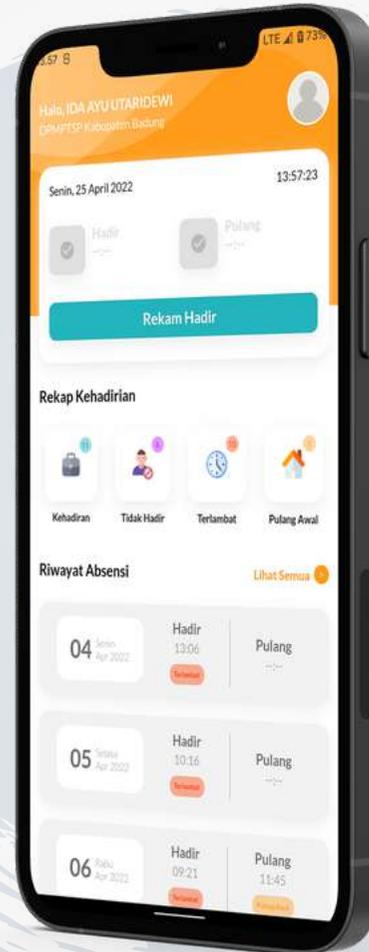
Laperon PKKPR
Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang



Pakta Integritas



BATARA
Badung Tata Ruang



Antrean Online
MPP. Kabupaten Badung Mobile



Pendukung SIMBG
Pendukung Sistem Informasi
Management Bangunan Gedung



SKM Online
Survei Kepuasan Masyarakat



TRUST
Survei Penilaian Integritas



Statistik



Absensi
Petugas MPP. Kabupaten
Badung Mobile



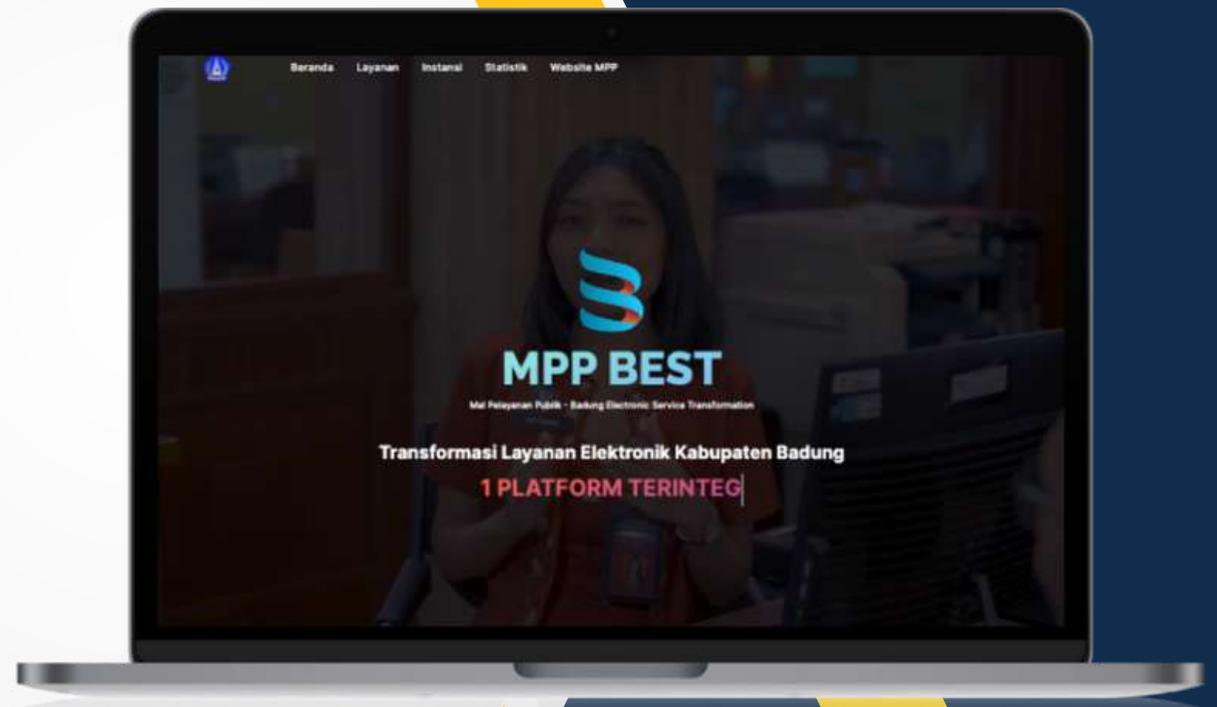


PORTAL PELAYANAN PUBLIK

Portal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian layanan elektronik ke dalam satu platform elektronik sehingga masyarakat bisa dengan mudah memilih layanan elektronik sesuai dengan kebutuhan mereka.

Portal Pelayanan Publik Terdiri Dari :

- ✓ **Single Sign On (SSO)**
Satu akun yang terintegrasi dengan seluruh platform pelayanan publik
- ✓ **Integrasi Pelayanan Publik**
Mengintegrasikan seluruh pelayanan publik masing - masing OPD kedalam satu portal pelayanan publik
- ✓ **Multiplatform**
Membangun portal pelayanan publik dengan berbagai platform online seperti website, aplikasi android dan IOS



**ONE STOP
SERVICES**



SSO
SINGLE SIGN ON



MULTI PLATFORM





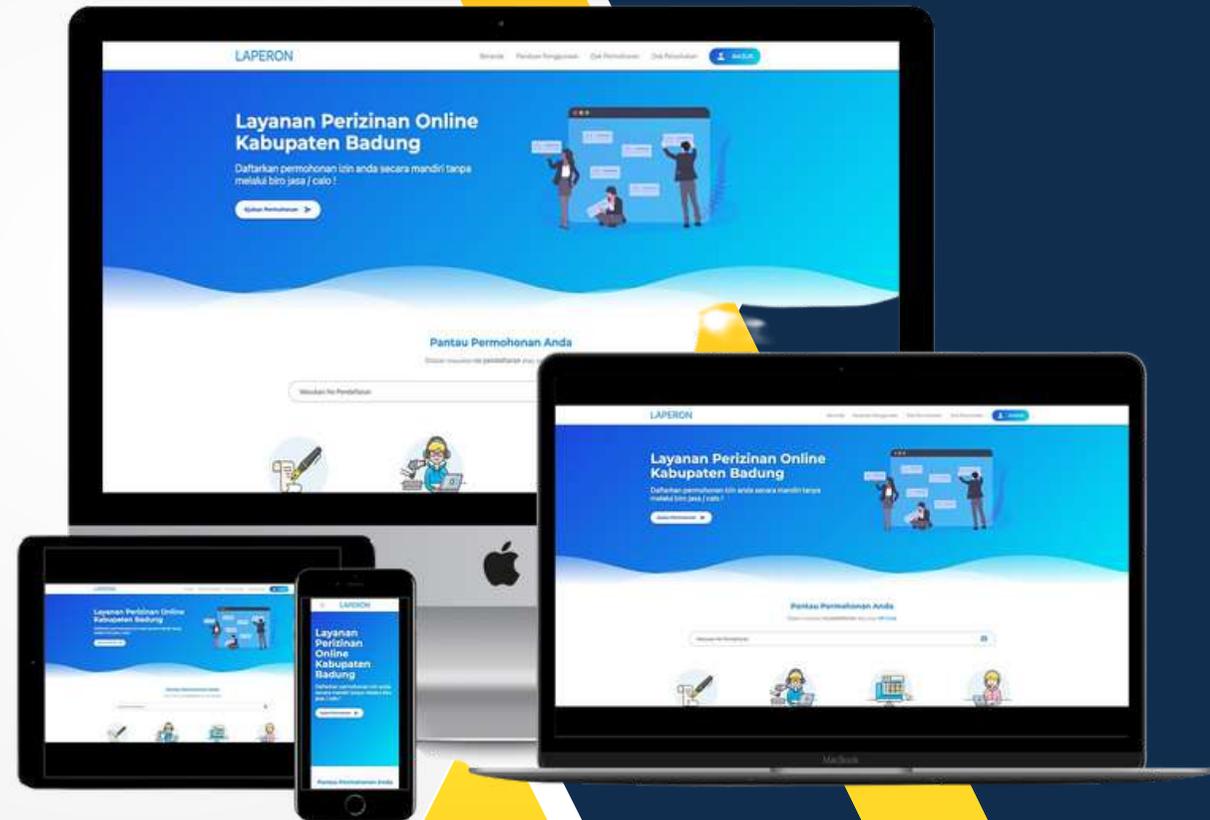
LAPERON



LAPERON

Layanan Perizinan Online dengan LAPERON

DPMPTSP Kab. Badung telah menerapkan sistem perizinan elektronik terintegrasi dengan seluruh proses pelayanan perizinan yang sudah dapat di urus secara online mulai dari pendaftaran izin, pembayaran retribusi / pajak sampai dengan distribusi izin kepada masyarakat.



<https://app.laperon.badungkab.go.id/>



LAPERON PERMATA

Layanan Perizinan Online Pemanfaatan Tata Ruang Mudah dan Transparan (LAPERON PERMATA) dibangun untuk memastikan kelancaran dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat dalam pengajuan permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) non berusaha di Kabupaten Badung.

Dengan LAPERON PERMATA, masyarakat dapat mengajukan dan memantau status permohonannya secara online melalui satu pintu layanan, yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan PKKPR non berusaha.

<https://pkkpr.laperon.badungkab.go.id/>



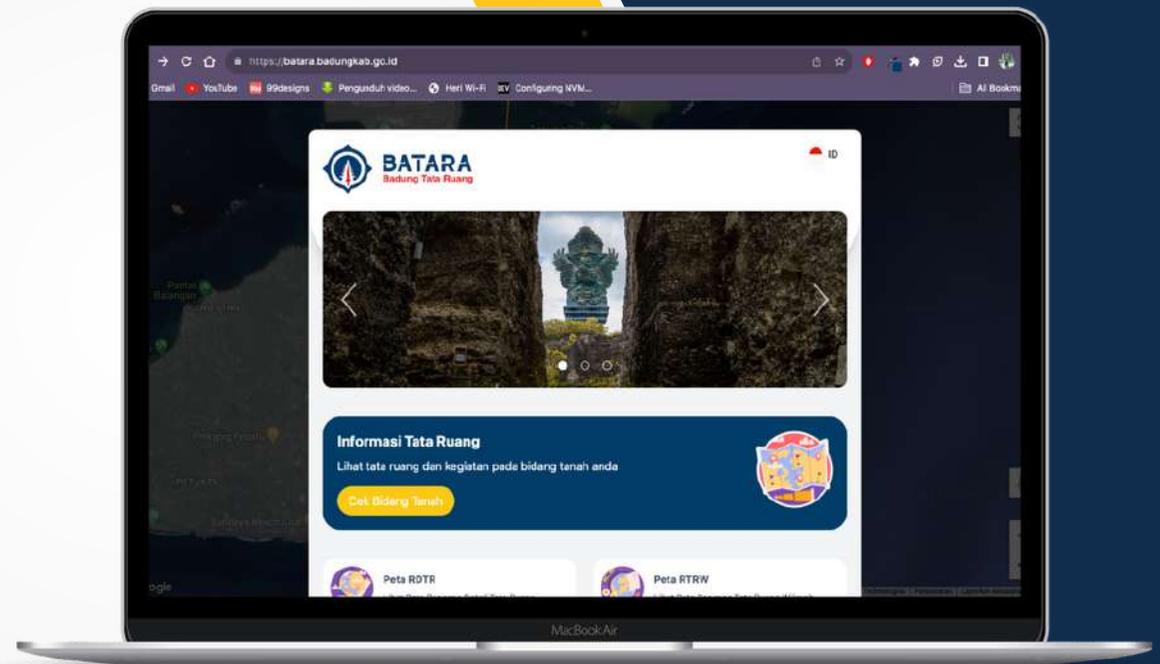


BATARA



BATARA
Badung Tata Ruang

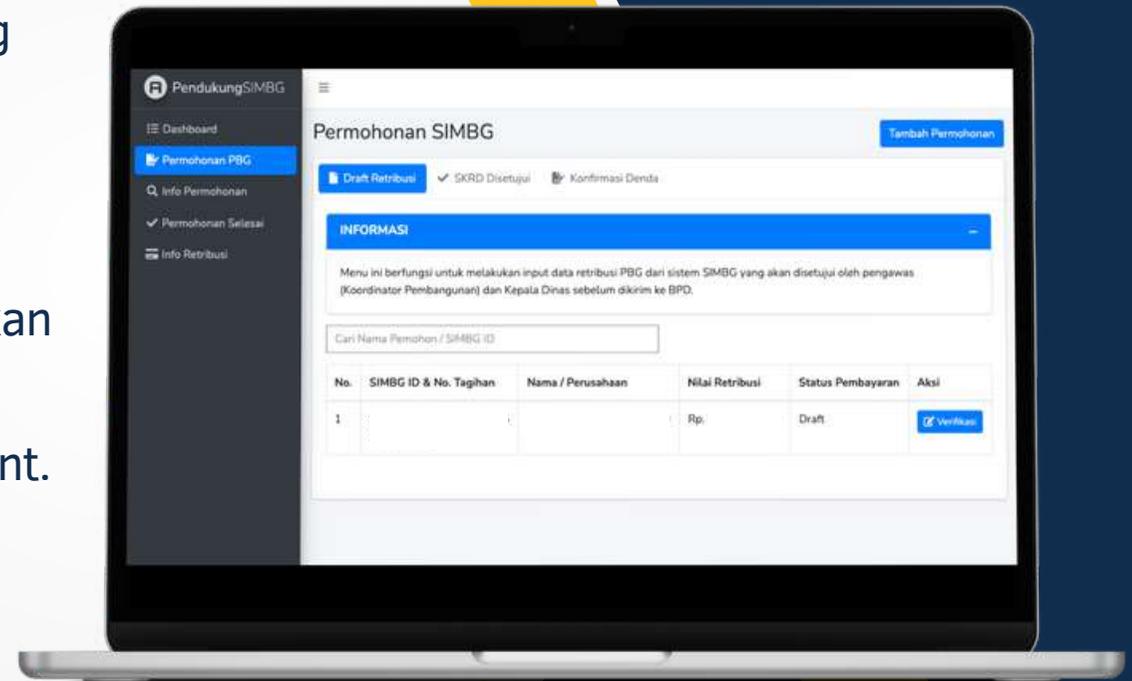
Batara merupakan sistem informasi tata ruang Kabupaten Badung yang dikembangkan oleh Dinas PUPR Kab. Badung. Sistem informasi BATARA dikembangkan berbasis website yang bisa diakses dimana saja melalui perangkat laptop, tablet maupun smartphone dengan alamat / url yaitu : <https://batara.badungkab.go.id>.





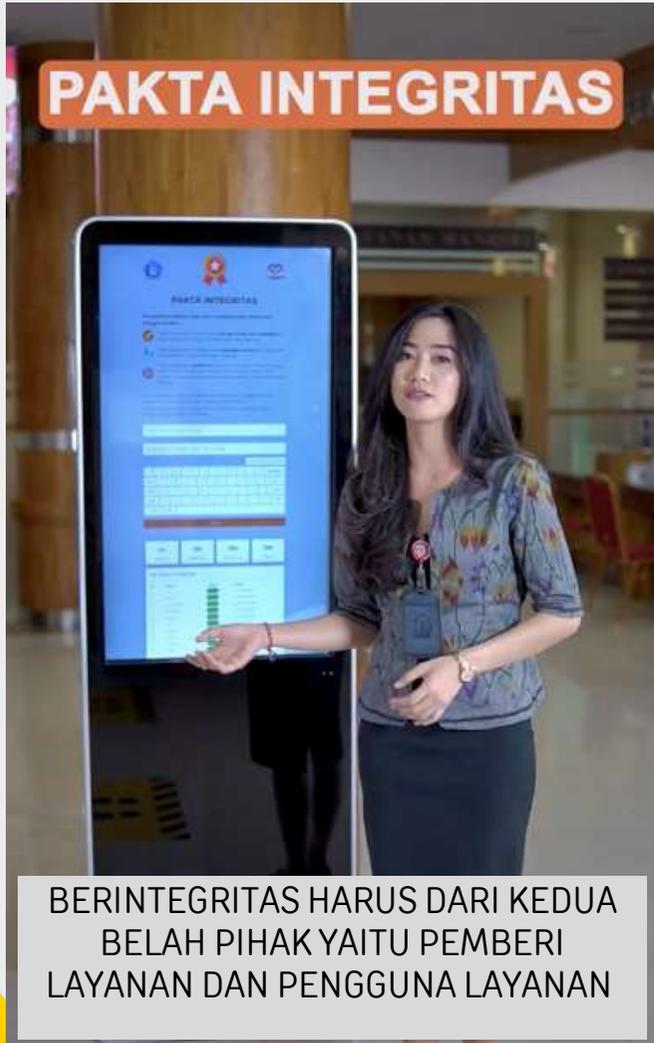
Pendukung SIMBG

Pendukung simbg adalah sistem pendukung untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi PBG/SLF. Sistem ini terintegrasi dengan BPD Bali payment sehingga pemohon dapat melakukan pembayaran secara online seperti transfer bank dan pembayaran melalui virtual account. <https://simbg.laperon.badungkab.go.id/>





PAKTA INTEGRITAS



BerAKHLAK

ANDA MEMASUKI AREA WAJIB
MEMBUAT
PAKTA INTEGRITAS



PAKTA INTEGRITAS

Menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan tindak pidana **Korupsi, Kolusi dan Nepotisme** di lingkungan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung.
- Tidak melakukan tindakan yang **melanggar hukum** di lingkungan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung.
- Tidak melakukan **gratifikasi** dengan memberikan imbalan (Uang, Makan Gratis, Penginapan Gratis, Tiket Pesawat, Diskon, dan imbalan lainnya) kepada petugas Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung

Jika melanggar ketentuan diatas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Silakan mengisi nama lengkap dan menekan tombol setuju untuk menandatangani PAKTA INTEGRITAS

Masukan nama anda

Masukan Email / No. Hp anda

Setuju

72

Hari ini

647

Bulan ini

1993

Tahun ini

1993

Total

List Pakta Integritas

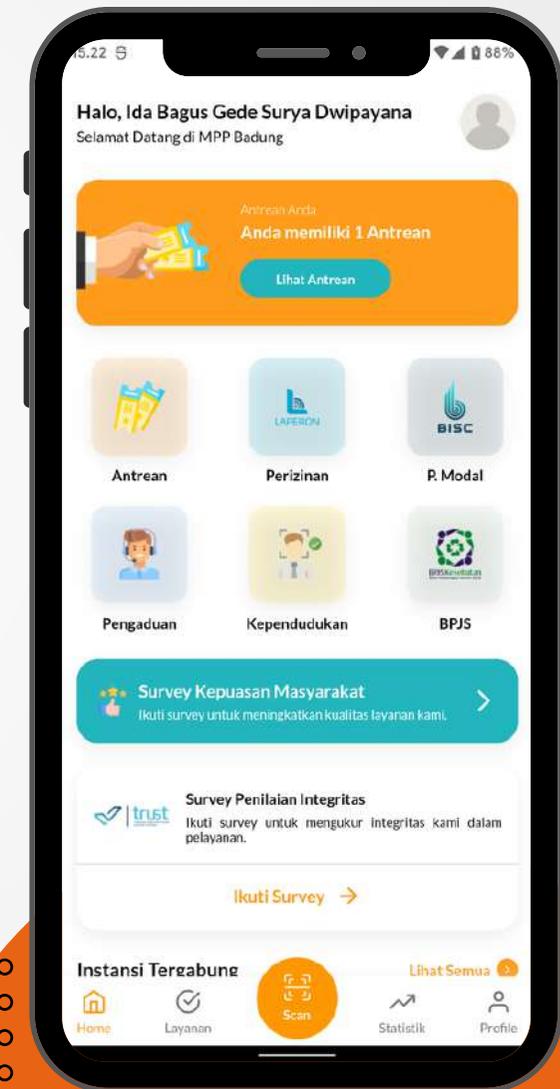


ANTREAN ONLINE



Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan pada MPP Kab. Badung. Kami mengembangkan sistem antrean online yang terintegrasi. Dengan fitur :

- Terintegrasi dengan pakta integritas
- Notifikasi antrean realtime
- Estimasi waktu tunggu
- Review layanan
- Terintegrasi dengan SKM dan TRUST





SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN

SP4N



Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat dikembangkan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dengan seluruh instansi di Indonesia.

Sidumas



Sidumas merupakan layanan pengaduan milik Kabupaten Badung untuk memudahhi seluruh pengaduan di Kabupaten Badung.

MPP CARE



MPP CARE adalah sistem manajemen pengaduan secara elektronik.

Call Centre



Layanan Call Center di 1500-273





Omnichannel

Omnichannel merupakan sebuah aplikasi yang dapat memantau pengaduan yang masuk dari Call Center 1500-273, comment Instagram, comment Facebook maupun Facebook Messenger. Omnichannel memantau semua aktifitas pengaduan dari berbagai sosial media hanya dalam satu aplikasi

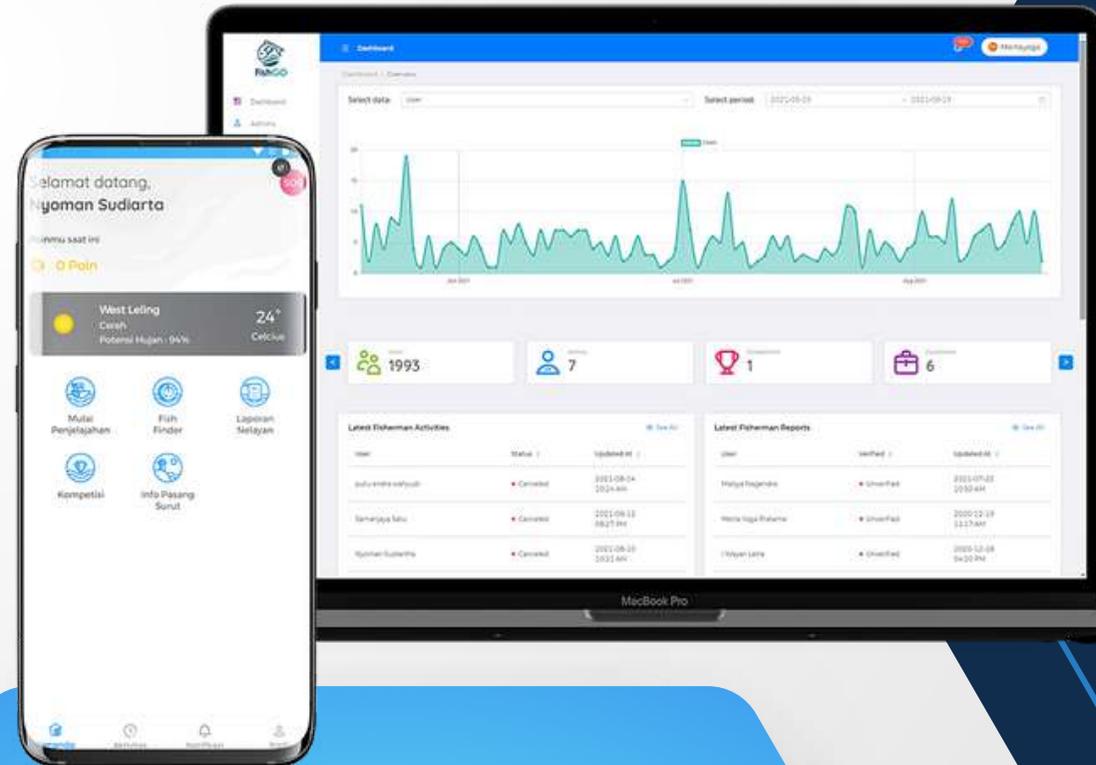




Fish Go

FishGo merupakan aplikasi berbasis navigasi untuk nelayan tradisional. Aplikasi ini memberikan informasi yang diprediksi menggunakan citra satelit. Aplikasi ini juga dapat menentukan posisi keberadaan ikan dengan *fish finder*, menentukan waktu penangkapan terbaik serta rute penangkapan yang aman untuk nelayan tradisional.

Aplikasi Fish-Go dapat menampilkan jarak antara pelabuhan dan lokasi ikan di laut. Aplikasi ini juga dapat menghemat biaya para nelayan seperti irit bahan bakar serta mampu memberikan jaminan keamanan, Fish-Go juga memberikan informasi mengenai rute yang aman. **Aplikasi Fish Go dapat diunduh melalui Google Play**





**PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG**



INFORMASI KONTAK



Telpon
0361 471 525 9



Whatsapp
0815 5803 1000



E-mail :
dpmptspbadung
kab@gmail.com



Call Center
1500 273



Jl. Raya Sempidi -
Mengwi - Kabupaten
Badung - Bali, 80351



Website :
dpmptsp.badung
kab.go.id

Scan QR Code dibawah untuk
mengunduh file digital buku ini

